

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor pariwisata di Indonesia berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar ekonomi utama, karena negara ini menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang menarik bagi wisatawan mancanegara (Fildzah et al., 2015). Tercatat hingga saat ini terus terdapat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia meskipun terdapat beberapa krisis global (Humas UNNES, 2023). Pada tahun 2022 tercatat 5,47 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat 251,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Indonesiabaik.id, 2023). Data Kemenparekraf mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9,94 juta pada Januari - Oktober 2023, naik 124,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (panrb, 2023). Data terbaru BPS mencatat adanya 1,14 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Desember 2023, menunjukkan peningkatan 22,91% dari bulan sebelumnya (Annur, 2024).

Perkembangan pariwisata yang sangat pesat tersebut disebabkan oleh pengembangan desa wisata. UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Setiap desa memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, sehingga tidak ada desa yang sama persis dalam hal ekonomi, sosial, atau budaya dengan desa lainnya. Keunikan ini bisa menjadi daya tarik pariwisata bagi sebuah desa. Ketika desa memiliki daya tarik pariwisata yang didukung dengan infrastruktur, fasilitas, dan

transportasi yang baik, kegiatan pariwisata dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2018, Kementerian Desa mencatat adanya 7.275 desa wisata di Indonesia. Pulau Jawa sendiri memiliki sebanyak 2.999 desa wisata, tersebar di Provinsi Banten (144 desa), Jawa Barat (761 desa), Jawa Tengah (761 desa), Jawa Timur (1.155 desa), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (178 desa). Desa-desa wisata ini dikelompokkan ke dalam empat kategori: desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri (Wirdayanti et al., 2021).

Pengelompokkan desa wisata tersebut didasarkan oleh pembangunan pariwisata yang dilakukan pada desa tersebut. Pembangunan pariwisata haruslah mengikuti prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang merupakan upaya terintegrasi dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan mengelola pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan (Pratama, 2016).

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi (*prosperity*), lingkungan (*planet*), dan sosial budaya (*people*) (Wirdayanti et al., 2021). Konsep ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Pengembangan pariwisata di suatu kawasan wisata atau desa diharapkan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menerapkan konsep Community Based Tourism (CBT). Pendekatan ini mengharuskan pengelolaan pariwisata dilakukan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, dengan menggunakan

prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (N et al., 2015). Kolaborasi multi-pihak yang diinisiasi oleh masyarakat lokal akan mendorong semangat untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan beragam destinasi wisata, salah satunya adalah Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran merupakan satu kawasan wisata yang mengimplementasikan konsep CBT. Proses pengembangan kawasan ini dimulai sejak tahun 1999 oleh Kelompok Karang Taruna Kalurahan Nglanggeran, yang awalnya mengadakan berbagai kegiatan seperti penanaman pohon di area Gunung Api Purba dan inisiatif lainnya. Pada tahun yang sama, dikeluarkan SK Kepala Desa Nglanggeran No.05/KPTS/1999 yang mengatur pengelolaan lahan seluas 48 hektar untuk digunakan oleh pemuda Karang Taruna Kalurahan Nglanggeran. Seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, dan akhirnya terbentuklah Kelompok Sadar Wisata yang dikelola oleh anggota Karang Taruna Kalurahan Nglanggeran. Kelompok ini memiliki peran penting dalam mengelola Kawasan Gunung Api Purba menjadi desa wisata mandiri yang berhasil meraih berbagai penghargaan.

Kawasan Wisata Gunung Api Purba telah meraih banyak penghargaan dan prestasi sejak awal pengembangannya. Di antaranya adalah penghargaan sebagai Best Tourism Village UNWTO 2021, Desa Wisata Berkelanjutan 2021, Desa Wisata Mandiri Inspiratif oleh Menparekraf 2021, Pemenang Asean Sustainable

Tourism Award 2018, Pemenang Desa Wisata Terbaik dengan konsep CBT pada 2017, CIPTA Award dari Kemenbudpar RI pada 2011, serta Juara II Desa Penerima PNPM Pariwisata Berprestasi Tingkat Nasional pada 2013 (Kemenparekraf, 2021).

Kehadiran berbagai destinasi wisata yang mempromosikan keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan kearifan lokal masyarakat membuat Kawasan Wisata Gunung Api Purba menjadi sangat menarik untuk dikunjungi. Dampaknya terlihat pada jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Pada tahun 2020, tercatat 61.650 wisatawan mengunjungi Kawasan Wisata Gunung Api Purba, sementara pada tahun 2021 jumlahnya turun menjadi 51.759 wisatawan, dan kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 75.392 wisatawan. Pada tahun 2023, kawasan ini dikunjungi oleh sekitar 58.600 wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri (Pokdarwis Nglanggeran, 2024).

Kunjungan wisatawan tersebut tentunya menjadikan Kawasan Wisata Gunung Api Purba menjadi berkembang. Berkembangnya suatu kawasan wisata tentunya memiliki dampak terhadap suatu masyarakat, khususnya pada aspek sosial. Dampak sosial menurut Hadi (2009) merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan, meliputi cara hidup (*ways of life*), budaya dan komunitas.

Dampak sosial terjadi atas pengembangan suatu pariwisata diakibatkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dampak sosial yang dirasakan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif merupakan dampak yang dianggap baik, sedangkan

dampak negatif adalah dampak yang dianggap buruk atau memperburuk suatu keadaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan suatu pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan peluang kerja, peningkatan pendapatan, pelestarian budaya, kemajemukan masyarakat, dan pertukaran informasi. Namun pada kenyataannya, perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pengembangan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif yang dapat terjadi berupa *community division*, pelanggaran nilai dan norma, komersialisasi budaya, bahkan konflik sosial (Aminuddin et al., 2022; Prabowo et al., 2021; Rinnanik & Mustofa, 2021; Risfaisal et al., 2022; Rohani & Irdana, 2021; Yusrizal & Agung, 2020).

Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran dikhawatirkan dapat memunculkan pergeseran terhadap kehidupan sosial Masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Apabila pengembangan kawasan wisata yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan beberapa kerugian sekaligus. Pertama, sektor pertanian jadi terbengkalai, petani beralih profesi menjadi penjual jasa wisata. Kedua, terjadi urbanisasi yang dapat menimbulkan pengangguran. Ketiga, terjadi spekulasi tanah sehingga harga tanah semakin mahal dan tidak jarang menimbulkan konflik sengketa lahan. Keempat, terjadi pengikisan kehidupan beragama. Kelima, terjadi komersialisasi seni budaya, yang menjurus pada terjadinya penurunan kualitas hasil kebudayaan itu sendiri.

Pekerja sosial sebagai profesi kemanusiaan yang membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu saja dapat berperan dalam suatu pembangunan

maupun pengembangan industri pariwisata. Heru Sukoco (1995) menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki banyak peran yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan *setting* praktiknya. Pekerja sosial di *setting* pariwisata dapat berperan sebagai *enabler, broker, educator, expert, social planner*, dan fasilitator.

Pekerja sosial dapat menstimulasi maupun mendukung proses pengembangan masyarakat. Peran tersebut dilakukan untuk mempermudah proses perubahan pada individu, kelompok, dan masyarakat, menjadi katalisator untuk bertindak dan membantu pada seluruh proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, dan alat yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu hadir agar pengembangan suatu kawasan wisata dapat berjalan dengan optimal dan tidak menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba berdampak terhadap aspek sosial masyarakat di Kalurahan Nglanggeran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan gambaran empiris tentang “Dampak Sosial Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Terhadap Masyarakat di Kalurahan Nglanggeran”.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Sosial Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba terhadap Masyarakat di Kalurahan Nglanggeran,

Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul?” Selanjutnya rumusan masalah ini difokuskan kedalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana cara hidup (*way of life*) masyarakat Kalurahan Nglanggeran?
3. Bagaimana budaya masyarakat Kalurahan Nglanggeran?
4. Bagaimana komunitas masyarakat Kalurahan Nglanggeran?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara empirik mengenai:

1. Karakteristik responden.
2. Cara hidup (*ways of life*) masyarakat Kalurahan Nglanggeran setelah adanya pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran.
3. Budaya masyarakat Kalurahan Nglanggeran setelah adanya pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran.
4. Komunitas masyarakat Kalurahan Nglanggeran setelah adanya pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan praktik pekerja sosial maupun ilmu kesejahteraan sosial khususnya tentang dampak sosial dari pengembangan suatu kawasan wisata.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan wisata dan sebagai dasar pertimbangan atau kebijakan bagi program pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata di Kabupaten Gunungkidul.

### 1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan panduan yang telah disediakan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah :

- BAB I        PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II        KAJIAN TEORITIS, memuat tentang penelitian terdahulu, konsep dan teori yang mendasari penelitian, serta kerangka pemikiran.
- BAB III        METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian, langkah-langkah penelitian, dan jadwal penelitian.
- BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V        USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama

program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI      SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.